Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis dalam Kasus Penyeludupan oleh Maskapai Lokal di Indonesia

Hasna Nabila Wahidah¹, Halimah Azahrah², Khairunnisa Amalina³,
Meyna Umu Kafka Nafisah⁴

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia ¹⁻⁴

Email Korespondensi: : halimahzahrah@umbandung.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 02-07-2025

Disetujui 08-07-2025

Diterbitkan 10-07-2025

ABSTRACT

This study examines violations of business ethics and law committed by high-ranking officials within a state-owned enterprise. The core issue lies in the abuse of authority and misuse of state facilities for personal interests, reflecting weak ethical leadership and internal organizational oversight. The inconsistency of such actions with the principles of responsibility and honesty becomes the main focus in the ethical evaluation of this case. The objective of this research is to identify and analyze the forms of ethical and legal violations in a luxury goods smuggling case involving a corporate executive. This study also aims to provide strategic recommendations to prevent similar violations in the future through the reinforcement of ethical business practices and good corporate governance. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. The unit of analysis focuses on the smuggling act carried out by a corporate official in 2019. Data collection was conducted through documentation studies from credible media sources, official government statements, and academic literature. Thematic analysis was used, involving data reduction, categorization, and in-depth interpretation of the context and impact of the actions. The results reveal violations of honesty, moral responsibility, and transparency. These violations have negatively impacted the organization's reputation and the integrity of its internal human resources. This study recommends strengthening internal control systems, implementing regular ethics training, and enforcing a comprehensive and firm code of ethics at all levels of the organization.

Keywords: *Business Ethics and Law, Human Resources, Abuse of Power*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran etika dan hukum bisnis yang dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi di salah satu badan usaha milik negara. Permasalahan utama terletak pada penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yang mencerminkan lemahnya etika kepemimpinan dan sistem pengawasan internal organisasi. Ketidaksesuaian tindakan dengan prinsip tanggung jawab dan kejujuran menjadi titik fokus dalam evaluasi etis kasus ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pelanggaran etika serta hukum bisnis dalam kasus penyelundupan barang mewah oleh pejabat tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran strategis dalam upaya mencegah pelanggaran serupa di masa

mendatang melalui penguatan prinsip etika bisnis dan tata kelola yang baik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Unit analisis berupa tindakan penyelundupan oleh pejabat pada tahun 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari media terpercaya, pernyataan resmi pemerintah, dan literatur akademik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi mendalam terhadap konteks serta dampak tindakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, tanggung jawab moral, dan transparansi. Pelanggaran ini berdampak buruk terhadap reputasi organisasi dan integritas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal, pelatihan etika secara rutin, serta implementasi kode etik yang tegas dan menyeluruh untuk seluruh lapisan organisasi.

Katakunci: Etika Hukum Bisnis, Sumber Daya Manusia, Penyalahgunaan Jabatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Halimah Azahrah, Khairunnisa Amalina, & Meyna Umu Kafka Nafisah. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Hukum Bisnis dalam Kasus Penyeludupan oleh Maskapai Lokal di Indonesia Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2157-2170. <https://doi.org/10.63822/2wv2ae29>

PENDAHULUAN

(Crane & Matten, 2016), etika bisnis merupakan fondasi moral yang menuntun setiap aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Etika ini mencakup prinsip-prinsip universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi yang wajib dijalankan oleh seluruh pelaku bisnis, baik individu maupun korporasi. (VELASQUEZ, 2009) Etika bisnis berperan penting sebagai penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan moralitas. (Tricker, 2019) Konsep ini menjadi semakin relevan ketika diterapkan dalam konteks sektor publik, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memikul amanah pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya negara secara etis. Etika bisnis yang diterapkan secara menyeluruh dalam BUMN mampu membentuk kepercayaan jangka panjang dari publik terhadap integritas lembaga. Praktik bisnis yang beretika menjadi indikator kredibilitas kepemimpinan dan arah strategis perusahaan milik negara. Lingkungan bisnis yang semakin transparan, ekspektasi publik terhadap etika perusahaan kian meningkat sehingga penerapan prinsip etika bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral dan sosial.

Menurut (Basri, 2021), kasus pelanggaran etika oleh pejabat tinggi dalam BUMN menjadi sorotan karena memperlihatkan konflik antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan publik (Indrajit & Djokopranoto, 2006) Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang untuk kepentingan nonorganisasi. Fenomena tersebut mengindikasikan kegagalan sistem pengendalian internal dan lemahnya budaya etika dalam organisasi. (Treviño & Nelson, 2017) menyatakan bahwa lemahnya kepemimpinan etis serta absennya mekanisme pelaporan internal yang efektif memperparah penyimpangan di tingkat manajerial organisasi. (Effendi & Windari, 2022) menyatakan bahwa perilaku tidak etis tidak hanya merusak integritas pribadi, tetapi juga merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan publik terhadap BUMN sangat dipengaruhi oleh perilaku pejabatnya dalam menjalankan amanah jabatan. Ketika nilai etika diabaikan, struktur organisasi menjadi rapuh dan kehilangan arah. Penegakan nilai etika dalam organisasi publik membutuhkan kepemimpinan yang berkomitmen, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya kerja yang menghargai integritas.

(Lestari & Nugroho, 2020), penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan sebagai respons terhadap minimnya kajian yang memfokuskan analisis pelanggaran etika di lingkungan BUMN dari sudut pandang sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek hukum atau kebijakan tanpa menggali dampak psikologis dan kultural terhadap pegawai. Temuan ini sejalan dengan studi oleh (Robbins, 1996) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang tercemar oleh perilaku tidak etis pimpinan berdampak langsung pada motivasi, loyalitas, dan kesehatan psikologis staf. Pendekatan yang menempatkan SDM sebagai titik sentral dalam analisis menjadi pembeda dalam studi ini. Pegawai yang bekerja dalam lingkungan etis akan merasa aman dan dihargai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta menurunkan tingkat *turnover*. Sistem manajemen SDM berbasis etika menciptakan iklim kerja yang adil, terbuka, dan mendukung pertumbuhan profesional.

(Keraf, 1998), kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip etika bisnis. Terdapat empat prinsip utama yang harus dijalankan dalam dunia bisnis, yaitu kejujuran, tanggung jawab moral, transparansi, dan keadilan. (Beauchamp et al., 2019), Prinsip ini relevan diterapkan dalam menilai kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, seperti yang terjadi dalam BUMN. Pandangan Keraf juga diperkuat oleh teori etika deontologis Kantian, yang menekankan kewajiban moral dan kepatuhan terhadap

norma tanpa memperhitungkan keuntungan pribadi. Setiap prinsip etika ini harus diinternalisasi dalam struktur dan budaya organisasi agar menjadi pedoman dalam bertindak. Penegakan prinsip etika yang kuat akan mendorong tata kelola perusahaan yang sehat dan tahan terhadap tekanan eksternal maupun konflik kepentingan internal.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada bentuk pelanggaran etika dan hukum bisnis yang dilakukan oleh pejabat tinggi di lingkungan BUMN, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan melalui penguatan sistem nilai dan tata kelola organisasi. Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena tidak hanya menelaah aspek hukum dan tata kelola, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana pelanggaran tersebut berdampak pada motivasi, integritas, dan loyalitas pegawai sebagai bagian penting dari sumber daya manusia dalam organisasi.

(Bertens, 2002), etika merupakan cabang filsafat yang secara sistematis mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral. Etika berfungsi sebagai panduan bagi individu maupun kelompok dalam menentukan tindakan yang dianggap baik, benar, dan bertanggung jawab. Etika tidak hanya mengajarkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etika juga mendorong seseorang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan moral yang rasional dan adil. Setiap keputusan manusia berkaitan dengan pertimbangan etis, termasuk dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan organisasi. Pengetahuan tentang etika memberikan kemampuan bagi seseorang untuk menilai tindakan berdasarkan ukuran nilai moral, bukan hanya berdasarkan keuntungan pribadi.

Etika berbeda dengan hukum. Etika tidak selalu memiliki sanksi formal. Etika tetap memiliki kekuatan moral yang mengikat. Etika menjadi bagian penting dari sistem sosial yang menjaga keseimbangan perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum memberikan batasan legal yang wajib ditaati oleh semua warga negara, sedangkan etika membimbing seseorang untuk melakukan hal yang benar walaupun tidak ada aturan tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, etika menjadi pedoman dalam berinteraksi, baik di lingkungan pribadi, sosial, maupun profesional. Nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menciptakan hubungan sosial yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Etika dalam konteks organisasi dan bisnis menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan relasi antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Organisasi yang menerapkan etika akan memiliki budaya kerja yang sehat dan mampu menciptakan iklim kerja yang harmonis serta profesional.

Bertens juga menegaskan bahwa etika tidak bersifat subjektif. Etika harus diletakkan dalam kerangka pemikiran yang rasional dan universal. Pemahaman terhadap etika memerlukan refleksi kritis atas tindakan manusia. Etika juga membutuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Tindakan yang tidak didasarkan pada pertimbangan etis berisiko merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan dalam lingkungan sosial. Etika memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pribadi maupun budaya organisasi yang sehat dan berintegritas. Individu yang memiliki kesadaran etis tinggi akan bertindak dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjunjung keadilan dalam setiap interaksi. Etika menjadi landasan utama bagi terciptanya keadaban sosial dan perilaku profesional yang bermartabat.

(Fuady, 2014), hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan pihak lain, termasuk negara, konsumen, dan mitra bisnis, dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Hukum bisnis hadir sebagai kerangka hukum yang memberikan kejelasan dalam interaksi ekonomi, baik pada sektor formal maupun informal. Aturan ini dirancang untuk

menciptakan stabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Setiap pelaku usaha wajib memahami dan mematuhi hukum bisnis agar kegiatan usahanya tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum ini memberikan batasan agar aktivitas bisnis berjalan sesuai koridor legal dan tidak merugikan kepentingan publik. Hukum bisnis juga bertujuan mencegah terjadinya praktik-praktik curang, kolusi, monopoli, dan bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan masyarakat atau negara. Pemahaman terhadap prinsip dan peraturan dalam hukum bisnis sangat penting bagi perusahaan agar terhindar dari risiko hukum. Pengetahuan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menetapkan kewajiban bagi setiap individu atau badan usaha untuk melaporkan barang impor secara benar dan lengkap. Ketentuan ini mengatur tata kelola kegiatan impor agar tidak terjadi pelanggaran seperti penyelundupan barang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara serta merusak tatanan perdagangan yang sehat. Kewajiban pelaporan yang transparan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam sektor perdagangan internasional. Negara memiliki otoritas penuh untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanaan guna menjaga keadilan ekonomi dan kepentingan nasional.

Pasal 263 KUHP menyebut bahwa pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana. Tindakan ini kerap terjadi dalam praktik bisnis yang tidak etis, termasuk dalam penyalahgunaan identitas atau dokumen untuk menghindari prosedur hukum. Pemalsuan dokumen dalam konteks bisnis menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dapat merusak integritas sistem hukum. Pelaku dapat menghadapi sanksi pidana, termasuk penjara dan denda, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Perusahaan yang terbukti terlibat dalam pemalsuan dokumen berisiko kehilangan reputasi dan kepercayaan dari publik, mitra, dan regulator.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan bahwa pejabat perusahaan negara tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pejabat memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan negara dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pelanggaran terhadap aturan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum sekaligus kegagalan dalam menjunjung nilai etika bisnis. Penyalahgunaan jabatan dan aset negara mengindikasikan lemahnya kontrol internal serta rendahnya kesadaran etis pejabat publik. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga merusak moral organisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi BUMN.

(Crane & Matten, 2016), etika bisnis merupakan cabang etika terapan yang mengkaji prinsip moral dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam pengambilan keputusan dan interaksi organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika bisnis mengatur bagaimana perusahaan bertindak secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis mencakup kejujuran, tanggung jawab, integritas, transparansi, serta kepedulian terhadap kepentingan publik. Etika menjadi pijakan penting dalam membentuk keputusan manajerial yang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat luas. Etika juga menjadi acuan dalam membangun hubungan kerja yang sehat, profesional, dan berkelanjutan antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

(Fuady, 2014), hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan keuangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Hukum bisnis

memberikan batasan legal agar kegiatan usaha tidak merugikan pihak lain dan tetap berjalan sesuai norma hukum yang berlaku. Pelaku usaha yang melanggar hukum bisnis dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Peraturan dalam hukum bisnis tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hukum mendorong agar pelaku usaha menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan bertanggung jawab terhadap konsumen, mitra usaha, dan negara.

Etika dan hukum bisnis saling melengkapi dalam membentuk perilaku organisasi yang bermoral dan taat aturan. Etika memberikan dasar nilai moral yang tidak selalu tertulis dalam hukum. Hukum menyediakan kerangka legal formal yang wajib ditaati. Etika memberi ruang refleksi atas apa yang layak dilakukan, bahkan dalam situasi yang belum diatur oleh hukum. Hukum memberi kejelasan batas hak dan kewajiban agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Perusahaan yang mampu menerapkan keduanya secara bersamaan akan membentuk budaya organisasi yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan. Organisasi yang mengabaikan salah satu aspek tersebut berisiko mengalami konflik internal, penurunan reputasi, dan sanksi hukum.

Kombinasi antara etika dan hukum bisnis sangat penting dalam lingkungan perusahaan milik negara. Pejabat BUMN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi karena jabatannya terkait langsung dengan kepercayaan publik dan kepentingan negara. Pejabat tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum, tetapi juga menjaga integritas dan memberi teladan moral dalam memimpin organisasi. Pelanggaran terhadap etika dan hukum dalam perusahaan publik tidak hanya merugikan institusi. Pelanggaran juga dapat menurunkan citra negara secara keseluruhan. Dampaknya bukan hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga hilangnya legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Penegakan etika dan hukum yang konsisten dalam BUMN menjadi kunci utama untuk menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan publik.

(Marniati, Prof. Adjunct, 2020), Sumber daya manusia adalah orang yang mengelola atau terlibat dalam organisasi dengan melakukan kerja sama, baik secara internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi digerakkan oleh sumber daya manusia. Tidak ada organisasi yang dapat berjalan tanpa peran aktif manusia di dalamnya. SDM menjadi unsur utama dalam menjalankan strategi, kebijakan, dan proses operasional di seluruh lini. Tanpa kontribusi manusia, sistem dan teknologi tidak dapat dioperasikan secara maksimal.

(Dessler, 2020), Manajemen sumber daya manusia merupakan proses memperoleh, mengembangkan, mengevaluasi, dan memberi imbalan kepada tenaga kerja, serta menjaga hubungan kerja yang sehat dan produktif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Fungsi manajemen SDM tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pengembangan potensi, pembinaan moral kerja, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif. Proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan menjadi instrumen penting dalam mencapai keberhasilan organisasi jangka panjang.

Sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan etika organisasi. Kualitas etika dalam organisasi sangat bergantung pada perilaku pimpinan dan budaya kerja yang berkembang di lingkungan internal. Pegawai membutuhkan contoh moral dari atasan dan sistem yang mendukung nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. SDM yang memiliki kesadaran etis akan mampu menolak praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai organisasi. Etika yang dibangun melalui kepemimpinan dan pembiasaan menjadi pondasi kuat dalam membentuk loyalitas serta semangat kerja yang tinggi. Pelaksanaan tugas yang dilandasi oleh integritas akan menghasilkan pelayanan yang

berkualitas, adil, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara, pegawai tidak hanya bekerja untuk kepentingan perusahaan. Pegawai juga menjalankan mandat publik sebagai wakil negara dalam melayani kepentingan masyarakat. Tanggung jawab moral dan sosial lebih besar karena tindakan pegawai mencerminkan citra negara. Pelanggaran etika oleh pimpinan dapat menimbulkan dampak psikologis, menurunkan motivasi kerja, serta merusak kepercayaan terhadap sistem organisasi. Keteladanan moral dari pemimpin menjadi kunci dalam menjaga stabilitas etika di lingkungan kerja. Sistem pelaporan pelanggaran, pelatihan etika, dan penguatan nilai organisasi perlu dibangun untuk memperkuat karakter pegawai. Lingkungan kerja yang etis, adil, dan transparan akan mendukung perkembangan SDM yang loyal, produktif, dan berintegritas tinggi. Organisasi yang memperhatikan kesejahteraan psikologis dan moral pegawainya akan memiliki kekuatan internal yang solid dalam menghadapi tantangan eksternal.

(Soekanto & Mamudji, 2007), penyelundupan adalah tindakan melanggar hukum dengan cara memasukkan atau mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara secara ilegal, tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah. Penyelundupan dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari pajak, bea masuk, atau larangan tertentu dari otoritas negara. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan hukum kepabeanan yang mengatur kelancaran dan keadilan dalam lalu lintas barang antarnegara. Dalam konteks hukum, penyelundupan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, yang dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif. Negara mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat kehilangan potensi penerimaan negara. Penyelundupan juga melemahkan efektivitas pengawasan perdagangan lintas batas dan membuka peluang tindak kriminal lain seperti pencucian uang dan peredaran barang ilegal.

Dari perspektif etika bisnis, penyelundupan tidak hanya melanggar hukum negara. Penyelundupan juga merusak integritas dan tanggung jawab moral pelaku bisnis. Tindakan tersebut mencerminkan perilaku yang tidak jujur, manipulatif, dan tidak menghormati aturan bersama yang berlaku dalam aktivitas ekonomi. Etika bisnis menuntut keadilan dalam persaingan dan kepatuhan terhadap regulasi yang dibuat untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penyelundupan secara langsung mengganggu prinsip keadilan tersebut karena memberikan keuntungan tidak wajar bagi pelaku, sementara pihak lain yang taat hukum mengalami kerugian.

(Keraf, 1998), tindakan penyelundupan mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, yang merupakan nilai dasar dalam praktik bisnis yang etis. (Adolph, 2016), menambahkan bahwa pelaku penyelundupan secara sadar menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi, seperti pembayaran pajak dan bea masuk, demi keuntungan pribadi atau korporasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadikan pelaku tidak hanya bersalah secara hukum, tetapi juga secara moral. Ketiadaan integritas dalam kegiatan usaha akan menciptakan citra negatif terhadap perusahaan dan menurunkan kepercayaan dari pelanggan, mitra, serta regulator. Bisnis yang mengabaikan etika akan kesulitan mempertahankan reputasi dalam jangka panjang dan cenderung berhadapan dengan risiko hukum serta sosial yang tinggi.

Dalam dunia bisnis modern, penyelundupan dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, merusak persaingan pasar, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor usaha dan pemerintahan. Ketimpangan tersebut muncul karena pelaku penyelundupan memperoleh keuntungan melalui jalur tidak sah, sedangkan pelaku usaha yang taat hukum harus menanggung biaya dan prosedur yang lebih besar. Persaingan usaha menjadi tidak seimbang, sehingga menciptakan pasar yang tidak sehat. Kepercayaan

publik terhadap lembaga pemerintahan juga menurun karena praktik penyelundupan kerap kali melibatkan oknum di lingkungan birokrasi atau aparat negara. Kepercayaan yang hilang sulit dikembalikan dan dapat menurunkan legitimasi negara dalam menegakkan hukum.

Tindakan penyelundupan, meskipun menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap norma hukum dan etika yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dan tata kelola perusahaan. Praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menghancurkan fondasi moral yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan bisnis. Tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi dalam sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dunia usaha harus menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

(Soekanto & Mamudji, 2007; Basri, 2021). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena penyelundupan Harley-Davidson oleh Direksi Garuda Indonesia dari sudut pandang etika dan hukum bisnis. Data yang dikumpulkan berupa narasi, bukan angka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Studi ini mencakup pencarian dan analisis terhadap sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, berita, dokumen hukum, dan peraturan pemerintah yang relevan. Sumber data dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan. Data dianalisis secara tematik dengan cara mengidentifikasi pola, isu utama, dan hubungan antar konsep. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pelanggaran etika dan hukum bisnis yang terjadi dalam kasus penyelundupan motor Harley-Davidson oleh Direksi Garuda Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Data dianalisis dari dokumen resmi, berita media kredibel, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah terkait (Soekanto & Mamudji, 2007; Basri, 2021). Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggambarkan bentuk pelanggaran, mengidentifikasi titik lemah dalam sistem pengawasan, serta menjelaskan dampaknya terhadap reputasi dan kondisi internal organisasi, khususnya sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyelundupan oleh pejabat Garuda Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan teori-teori yang dibahas dalam kajian pustaka. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan bagaimana pelanggaran tersebut melanggar nilai etika bisnis, prinsip hukum perusahaan, serta merusak struktur organisasi dan budaya kerja di lingkungan BUMN (Treviño & Nelson, 2017; Fuady, 2014; Bertens, 2002).

Pelanggaran Etika dan Hukum Bisnis

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penyelundupan Harley-Davidson oleh Direksi Garuda Indonesia merupakan contoh konkret dari pelanggaran prinsip-prinsip etika dan hukum bisnis (Crane & Matten, 2016). Tindakan yang dilakukan bukan hanya sekadar pelanggaran administratif. Perbuatan

tersebut telah melampaui batas etika dan moral seorang pejabat publik (Bertens, 2002). Tindakan ini menggambarkan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab jabatan dan kegagalan dalam menjalankan amanah publik (Treviño & Nelson, 2017). Perbuatan tersebut melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum maupun etika bisnis (Fuady, 2014). Posisi sebagai pimpinan BUMN menuntut akuntabilitas tinggi karena berkaitan langsung dengan kepercayaan negara dan masyarakat (Basri, 2021).

Tindakan penyelundupan dilakukan dengan cara memasukkan barang mewah, yakni motor Harley-Davidson klasik dan sepeda Brompton, ke dalam pesawat baru Garuda yang dikirim dari Prancis ke Indonesia. Dalam proses ini, dokumen manifes diubah untuk menyamarkan identitas pemilik dan jenis barang. Perubahan dokumen tersebut menunjukkan adanya manipulasi data secara sadar dan terencana (Soekanto & Mamudji, 2007). Hal ini menunjukkan adanya niat dan perencanaan sistematis untuk menghindari bea masuk serta menyalahgunakan jalur distribusi resmi (Fuady, 2014). Penyelewengan seperti ini jelas melanggar Undang-Undang Kepabeanaan dan mencerminkan rendahnya komitmen terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab (Treviño & Nelson, 2017). Pelaku tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga mengkhianati nilai moral yang seharusnya melekat dalam setiap tindakan pejabat publik (Bertens, 2002).

Secara etika, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap keputusan pimpinan perusahaan, terlebih dalam lingkup BUMN (Crane & Matten, 2016). Perusahaan milik negara memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi karena mewakili kepentingan publik (Basri, 2021). Ketika pejabat tertinggi menunjukkan sikap tidak etis, maka seluruh organisasi ikut terpengaruh secara struktural maupun budaya (Treviño & Nelson, 2017). Tindakan ini menjadi sinyal kegagalan tata kelola dan ketidakefektifan pengawasan internal perusahaan (Fuady, 2014). Kejadian semacam ini menurunkan moral pegawai, merusak citra institusi, dan berisiko menimbulkan keraguan publik terhadap integritas lembaga negara (Crane & Matten, 2016).

Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara

Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi Garuda tidak hanya terbatas pada aspek etika personal. Pelanggaran ini juga mencerminkan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas yang diberikan oleh negara (Fuady, 2014). Jabatan sebagai pejabat tinggi BUMN membawa tanggung jawab moral dan hukum yang besar (Tricker, 2019). Pejabat tinggi perusahaan seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas jabatan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa posisi tersebut justru digunakan untuk memperkaya diri dan menghindari kewajiban hukum (Velasquez, 2009). Tindakan ini tidak hanya mencederai nilai kepercayaan publik, tetapi juga merusak reputasi institusi secara menyeluruh (Fuady, 2014).

Penggunaan pesawat negara untuk membawa barang pribadi, tanpa membayar bea masuk, merupakan bentuk eksploitasi jabatan dan pelecehan terhadap wewenang yang diberikan negara (Soekanto & Mamudji, 2007). Pesawat yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan negara dimanfaatkan sebagai sarana penyelundupan barang mewah. Fakta ini menunjukkan bahwa pemegang kekuasaan telah menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan secara profesional dan bertanggung jawab (Tricker, 2019). Pelanggaran ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan preseden buruk dalam pengelolaan aset negara oleh BUMN (Fuady, 2014).

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam internal BUMN sangat lemah. Tidak adanya deteksi dini terhadap penyalahgunaan aset dan tidak efektifnya kontrol atas prosedur logistik

memperlihatkan celah besar dalam struktur tata kelola (Velasquez, 2009). Struktur pengawasan internal yang seharusnya mencegah tindakan penyimpangan tidak mampu menjalankan fungsinya (Tricker, 2019). Pejabat tinggi mampu mengatur manifes penerbangan, menyamarkan identitas barang, dan melibatkan oknum lain dalam proses penyelundupan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyimpangan tidak dilakukan secara individu, tetapi melalui jaringan dan kolaborasi pihak-pihak yang berada dalam sistem (Soekanto & Mamudji, 2007). Situasi ini menggambarkan bahwa kontrol struktural tidak berjalan. Kontrol bahkan kemungkinan besar disalahgunakan oleh orang-orang dalam yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Organisasi mengalami kegagalan dalam membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah atau menindak penyalahgunaan jabatan (Fuady, 2014).

Penyalahgunaan ini juga memperlihatkan hilangnya kesadaran etika kepemimpinan dalam menjalankan amanah publik (Velasquez, 2009). Kepemimpinan dalam BUMN seharusnya dibangun di atas fondasi integritas, tanggung jawab moral, dan keberpihakan pada kepentingan publik (Tricker, 2019). Pejabat publik memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap negara dan masyarakat luas (Fuady, 2014). Dalam kasus ini, seluruh prinsip tersebut diabaikan demi keuntungan pribadi. Ketika nilai moral dikesampingkan, maka kehancuran kepercayaan publik menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan (Velasquez, 2009). Pemimpin yang tidak menjunjung nilai etika akan merusak sistem dari dalam dan menciptakan budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran (Tricker, 2019).

Dampak terhadap Sumber Daya Manusia dan Reputasi Organisasi

Tindakan tidak etis oleh pucuk pimpinan sebuah perusahaan milik negara akan menciptakan efek domino terhadap seluruh struktur organisasi, khususnya sumber daya manusia (SDM) (Dessler, 2020). Pelanggaran nilai-nilai etika oleh pejabat tertinggi mengganggu stabilitas moral dan profesionalisme di lingkungan kerja (Lestari & Nugroho, 2020). Kasus penyelundupan yang dilakukan oleh Direksi Garuda telah menciptakan krisis kepercayaan di internal perusahaan. Pegawai yang sebelumnya menganggap atasan sebagai panutan, kini justru dihadapkan pada kenyataan bahwa integritas institusi dipertaruhkan oleh kepentingan pribadi individu yang memiliki kekuasaan (Basri, 2021). Kepercayaan yang telah lama dibangun secara kolektif runtuh hanya dalam waktu singkat karena tindakan yang menyimpang dari nilai dasar organisasi (Lestari & Nugroho, 2020).

Kondisi ini menurunkan loyalitas, moral kerja, serta motivasi pegawai secara signifikan (Dessler, 2020). Pegawai tidak lagi melihat organisasi sebagai tempat yang menjunjung tinggi profesionalisme dan keadilan. Karyawan merasa tidak aman dan tidak dihargai karena nilai-nilai profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi justru dilanggar oleh pihak manajemen. Rasa kecewa terhadap kepemimpinan dapat menimbulkan sikap apatis, penurunan kinerja, bahkan keinginan untuk meninggalkan perusahaan (Lestari & Nugroho, 2020). Lingkungan kerja menjadi tercemar oleh ketidakpercayaan, kecemasan, dan hilangnya kejelasan arah kepemimpinan. Ketidakhadiran *moral leadership* memperburuk suasana kerja dan mengurangi kohesi antarkaryawan. Ketiadaan keteladanan dari manajemen puncak menyebabkan hilangnya motivasi untuk patuh terhadap aturan, karena nilai tersebut tidak lagi tercermin pada pemegang otoritas (Dessler, 2020).

Dalam sisi eksternal, citra Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional juga mengalami penurunan. Reputasi yang dibangun dengan susah payah menjadi ternoda akibat skandal yang melibatkan jajaran pimpinan tertinggi (Redaksi CNN Indonesia, 2020). Kasus ini menjadi sorotan media nasional dan internasional, menimbulkan keraguan publik terhadap integritas perusahaan BUMN secara umum. Persepsi

masyarakat terhadap BUMN menjadi negatif, karena publik memandang bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya mencerminkan individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem dalam organisasi (Basri, 2021). Investor, pelanggan, dan mitra bisnis pun menjadi lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama. Kredibilitas perusahaan dipertanyakan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi rusak hanya karena keputusan yang tidak etis dari beberapa individu di posisi puncak. Dampak dari peristiwa ini membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan, dan perusahaan harus bekerja lebih keras untuk merebut kembali kepercayaan publik dan mitra strategis (Redaksi CNN Indonesia, 2020).

Implikasi terhadap Tata Kelola dan Strategi Pencegahan

Dalam hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus ini menjadi bukti lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lingkungan BUMN (Tricker, 2019). Kegagalan ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola belum dijalankan secara menyeluruh dan konsisten di semua tingkat jabatan. Tata kelola yang baik seharusnya mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Fuady, 2014). Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk mengarahkan perilaku manajemen dan seluruh struktur organisasi agar sesuai dengan nilai hukum dan etika bisnis. Sistem GCG menjadi payung penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan pihak internal organisasi (Tricker, 2019). Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut gagal mendeteksi dan mencegah penyimpangan di tingkat pimpinan. Ketidakefektifan pengawasan internal mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan dan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur pengendalian (Fuady, 2014).

Untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali, organisasi perlu memperkuat sistem pengawasan internal yang bersifat preventif dan korektif (Lestari & Nugroho, 2020). Sistem ini harus bersifat menyeluruh, adaptif, dan mampu menyesuaikan dengan risiko operasional serta dinamika struktur organisasi. Mekanisme evaluasi internal wajib diperbarui secara berkala agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnis modern (Tricker, 2019). Kode etik harus ditegakkan secara menyeluruh, tidak hanya sebagai dokumen formal. Kode etik juga harus menjadi budaya organisasi yang hidup. Budaya etika harus dibangun melalui pembiasaan nilai, keteladanan dari pimpinan, serta integrasi dalam sistem manajemen kinerja (Lestari & Nugroho, 2020). Setiap pegawai, khususnya manajemen, harus melalui pelatihan etika secara berkala agar nilai-nilai integritas dan tanggung jawab moral terus tertanam dalam pengambilan keputusan (Fuady, 2014). Proses ini penting untuk mengembangkan kesadaran moral dalam setiap aspek manajerial, termasuk dalam situasi kompleks dan tekanan kerja tinggi.

Selain itu, perlu ada mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi pegawai untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut akan dampak negatif (Lestari & Nugroho, 2020). Sistem *whistleblowing* harus dijamin kerahasiaannya dan didukung oleh komitmen manajemen untuk menindaklanjuti laporan secara objektif dan adil. Keberadaan sistem ini menciptakan rasa aman bagi pegawai yang ingin menjaga nilai-nilai organisasi. Audit etika harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh, khususnya terhadap posisi-posisi strategis. Audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana evaluasi budaya organisasi secara menyeluruh (Tricker, 2019). Audit mampu mengidentifikasi celah potensi pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian besar. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mampu mencegah pelanggaran, tetapi juga menumbuhkan iklim etis dan profesional yang berkelanjutan. Organisasi yang

menanamkan nilai etika dalam sistem dan perilaku keseharian akan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal dan mempertahankan kepercayaan publik (Fuady, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kasus penyelundupan Harley-Davidson oleh Direksi Garuda Indonesia merupakan bentuk nyata dari pelanggaran etika dan hukum bisnis yang dilakukan oleh pejabat tinggi BUMN. Tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen, serta pelanggaran terhadap prosedur kepastian yang seharusnya menjadi tanggung jawab hukum seorang pemimpin perusahaan negara. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga mencederai prinsip moral dan integritas publik yang melekat dalam jabatan tersebut. Prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral terbukti diabaikan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen tertinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama mengapa pelanggaran tersebut tidak terdeteksi lebih awal. Tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat serta minimnya evaluasi berkala terhadap pejabat struktural membuat organisasi tidak mampu mencegah penyimpangan. Ketika pengawasan tidak berjalan optimal, ruang bagi tindakan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka. Dalam konteks tata kelola perusahaan, situasi ini mencerminkan ketidakefektifan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan integritas.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan pada level institusi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan budaya organisasi secara luas. Sumber daya manusia, sebagai elemen inti penggerak organisasi, mengalami penurunan semangat kerja, loyalitas, dan rasa percaya terhadap manajemen. Pegawai yang sebelumnya memandang pimpinan sebagai figur teladan harus menghadapi kenyataan bahwa nilai-nilai profesionalisme justru dilanggar oleh pihak yang seharusnya menjadi panutan. Kondisi ini menciptakan krisis internal yang mengganggu kestabilan operasional dan kualitas hubungan kerja dalam organisasi. Ketika lingkungan kerja kehilangan nilai kejujuran dan keteladanan, maka moral kolektif akan ikut runtuh dan memengaruhi efektivitas kerja secara keseluruhan.

Sementara kepercayaan publik terhadap Garuda Indonesia dan BUMN sebagai institusi negara juga mengalami penurunan. Sorotan tajam dari media, pengawasan masyarakat, serta tanggapan dari pemangku kepentingan eksternal memperburuk citra perusahaan secara nasional maupun global. Dalam era keterbukaan informasi, reputasi menjadi aset yang sangat mudah rusak akibat tindakan tidak etis dari individu yang memiliki posisi strategis. Pemulihan citra tersebut memerlukan waktu, usaha sistematis, dan konsistensi dalam menunjukkan perbaikan.

Sangat penting bagi Garuda Indonesia dan seluruh BUMN lainnya untuk menguatkan sistem tata kelola perusahaan dengan pendekatan berorientasi pada etika. Perusahaan perlu menanamkan kembali prinsip moral dalam setiap kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Pembentukan komite etika, penyusunan kebijakan integritas, serta pelaksanaan pelatihan rutin tentang etika bisnis dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Sistem pelaporan pelanggaran harus diperkuat dengan jaminan perlindungan bagi pelapor agar tercipta keberanian dalam menjaga nilai organisasi. Evaluasi kinerja pimpinan tidak cukup hanya berdasarkan pencapaian finansial, tetapi juga harus mencakup aspek integritas dan keteladanan moral.

Penerapan prinsip etika dan hukum bisnis yang konsisten serta penguatan mekanisme pengawasan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini tidak hanya penting untuk memperbaiki reputasi jangka pendek, tetapi juga untuk mewujudkan budaya organisasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Garuda Indonesia, sebagai representasi negara di sektor transportasi udara, harus menjadi contoh dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *濟無No Title No Title No Title* (4th ed.). Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fcSbDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=MtgcbkskWPC&dq=buku Business Ethics – Crane %26 Matten&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Beauchamp, T. L., Arnold, D. G., & Bowie, N. E. (2019). Ethical Theory and Business. *Ethical Theory and Business*. <https://doi.org/10.1017/9781108386128>
- Bertens, K. (2002). *Book-Etika-K-Bertens_Compress*.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dessler, G. (2020). Fundamentals of Human Resource Management. In *Human Resource Management* (16th editi, Issue November).
- Effendi, T., & Windari, R. (2022). Illegal Levies as a Negative Element Contributing to The Decrease of The Tourism Potential on Madura. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 3(1), 45–52. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v3i1.172>
- Fuady, M. (2014). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Ketiga, Volume 3*. prenada media. <https://books.google.co.id/books?id=71RqDwAAQBAJ&lpg=PR4&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Indrajit, R. E. ., & Djokopranoto, R. (2006). *MANAJEMEN'PERGURUAN'TINGGI'MODEREN' Rchardus'Djokopranoto' Rchardus'Eko'Indrajit' STIMIK*Perbanas**.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*.
- Lestari, L. M., & Nugroho, B. T. (2020). Pengaruh perilaku etis. *Jurnal Etika Organisasi*, 12(1), 45–60.
- Marniati, Prof.Adjunct, D. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Robbins, S. P. (1996). Organizational behavior: concepts, controversises, applications (perilaku organisasi: konsep, kontroversi). *Prentice-Hall*, 400.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (1st editio). Raja Grafindo Persada (CV Rajawali).
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2017). *Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do It Right* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Tricker, B. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (4th ed.). Oxford University Press.
- VELASQUEZ, M. G. (2009). *Business Ethics: Concepts and Cases*. 1–18.

Website

- (kompas.id, 2019)(Redaksi CNN Indonesia, 2020)(Detik.com, 2019)
- Detik.com. (2019). *Kronologi AA Beli Motor Harley Ilegal yang Diangkut Garuda*. Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4811124/kronologi-aa-beli-motor-harley-ilegal-yang-diangkut-garuda>
- kompas.id. (2019). *Ketidaktaatan Terjadi Terstruktur di Garuda Indonesia*. 2019-12-05.

<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/05/ketidaktaatan-terjadi-terstruktur-di-garuda-indonesia>
Lestari, L. M., & Nugroho, B. T. (2020). Pengaruh perilaku etis. *Jurnal Etika Organisasi*, 12(1), 45–60.
Redaksi CNN Indonesia. (2020). *KPK Periksa Dirut PT Mabua Harley-Davidson di Kasus Garuda*. 4
Februari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200204103427-12-471425/kpk-periksa-dirut-pt-mabua-harley-davidson-di-kasus-garuda>